

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah telah menjadi alternatif bagi para investor dan pelaku ekonomi yang membutuhkan institusi dan instrumen keuangan (*Islamic Financial Institution*) yang memenuhi kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*). Kepatuhan syariah adalah komponen atau aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Mardian, 2019). Islam menganjurkan untuk melakukan investasi, karena investasi merupakan kegiatan muamalah yang bermanfaat, dengan adanya investasi kekayaan akan menjadi lebih produktif dan bermanfaat. Karena di dalam Islam sumberdaya (harta) tidak diperbolehkan hanya untuk disimpan tetapi juga harus di produktifkan, sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, Hal ini juga merupakan implementasi penerapan ekonomi Islam. Investasi akan mendorong terciptanya kondisi positif bagi bisnis dan pekerjaan, serta menghindari dana hanya beredar di antara orang kaya. Investasi yang dianjurkan dalam islam tentu harus sesuai dengan syariat. Kehadiran produk syariah di pasar modal Indonesia juga membuka peluang berinvestasi bagi masyarakat yang meyakini bahwa produk investasi konvensional mengandung elemen-elemen yang diharamkan syariah (Soemitra, 2014).

Pasar modal berbasis integrasi produk syariah di Indonesia memberi harapan bagi industri perbankan syariah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber dana yang tersedia sesuai dengan prinsip syariah sembari menjaga keseimbangan antara likuiditas dan tingkat keuntungan (Hasanah, 2019). Pasar modal juga dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta (Husnan, 2015). Pasar modal juga

dianggap penting yaitu dalam rangka memobilisasi dana dari masyarakat dan dapat juga dijadikan sebagai indikator perekonomian negara (Faozan, 2013). Pasar Modal Syariah di Indonesia semakin kompetitif sejak diluncurkannya indeks saham syariah pertama kali pada 3 Juli 2000 yaitu Jakarta Islamic Index (JII). Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengeluarkan indeks saham syariah baru yaitu Jakarta Islamic Index 70 (JII 70). Indeks saham ini sama seperti indeks saham syariah sebelumnya yaitu Jakarta Islamic Index (JII) 30, hanya saja indeks ini terdiri dari 70 perusahaan dengan saham paling likuid setiap periodenya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019: 167). Pertambahan indeks saham syariah membuktikan bahwa saham syariah mulai diminati oleh banyak investor untuk menginvestasikan uangnya pada perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islami (Ersyafdi & Nasihah, 2021). Jakarta Islamic Index 70 (JII70 Index) adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konsisten JII 70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Pada bulan November 2018 nilai JII 70 sebesar 216,55 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada bulan Maret 2019 sebesar 234,80 atau sebesar 8,43% (finance.yahoo, 2019).

Laporan Keuangan merupakan suatu hal yang penting bagi para penggunanya. Laporan keuangan mengandung informasi tentang laba perusahaan dimana informasi tentang laba dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kepramareni et al., 2021). Baik kreditur maupun investor, menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan *earnings power*, dan untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang (Arganata, n.d.). Gambaran mengenai kinerja perusahaan selama satu periode tertuang pada laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan selalu menitik beratkan pada laba perusahaan. karena dapat dapat menunjukkan prestasi dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan.

Perusahaan yang di kelola dalam kondisi pertumbuhan dan persaingan yang ketat tidak selalu menghasilkan kinerja yang diharapkan, disisi lain untuk tumbuh, berkembang dan mempertahankan keberlangsungan

perusahaan, manajemen membutuhkan dana tambahan dari investor (Rusmana & Tanjung, 2020). Fakta ini terkadang membuat manajemen melakukan kecurangan untuk menutupi kinerja yang kurang baik tersebut agar memperoleh pendanaan baik dari investor maupun dari kreditur. Kecurangan laporan keuangan disamping memiliki motif untuk memperoleh kredit atau pendanaan dan menutupi kinerja yang buruk juga bertujuan untuk menjaga nilai saham. Laba merupakan komponen yang berasal dari selisih antara pendapatan dengan beban atau biaya. Oleh sebab itu pendapatan dan beban dapat dijadikan sebagai sasaran manajemen untuk mengelola laba (Sari & Ahmar, 2014). Salah satu kasus kecurangan laporan keuangan atau manipulasi laba yang terjadi di Indonesia yaitu terjadi pada PT. Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Atas kasus ini menteri keuangan Sri Mulyani menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin akuntan publik dan kantor akuntan publik selama 12 bulan (Kesuma, 2021). Kasus kecurangan lain juga terjadi pada Badan Usaha Miliki Negara yaitu PT. Waskita Karya Tbk (Triani, 2017).

Kualitas laba yang rendah dapat menyebabkan pengalokasian sumber daya yang kurang efisien dan sebagai akibatnya menyebabkan transfer kekayaan yang kurang tepat (Hamzah Muchtar et al., 2021). Kualitas laba adalah informasi laba yang tersedia untuk publik yang mampu menunjukkan sejauh mana laba secara akurat dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan (Hasna & Aris, n.d.). Kualitas laba dapat dipengaruhi oleh ada tidaknya manajemen laba (*earnings manajemen*) yang dilakukan manajemen. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara principal (pemilik perusahaan atau pemegang saham) dengan agen (manajemen). Perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak ini disebut *agency conflict*. *Agency conflict* ini mengakibatkan adanya sifat manajemen yang melaporkan labanya secara oportunistik untuk kepentingan pribadinya (*self interested*) (Nanang & Tanusdjaja, 2019).

Manajemen laba (manipulasi laba) sering kali tidak disadari oleh investor. Manajemen laba adalah menyembunyikan kinerja keuangan aktual pada

periode tertentu, sehingga tren yang mendasari pertumbuhan pendapatan dan laba akan tertutupi (McNichols & Stubben, 2008). Jika informasi tentang perusahaan dilaporkan secara salah (misreported), karena manajemen laba, maka perusahaan dapat over-invest atau under-invest. Di dalam bisnis islam terdapat konsep transparansi. Transparansi bermakna jelas, serta dapat dilihat secara menyeluruh. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap stakeholder. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus menyajikan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan, maupun laporan lain yang relevan. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al- Baqarah:282).

Hadirnya sistem tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa dikenal dengan *Good corporate governance* (GCG) membuat perusahaan menjadi semakin efektif dalam melaksanakan praktik bisnisnya. *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan sekaligus mencegah terjadinya manajemen laba yang dilakukan perusahaan, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kepercayaan investor atas laporan keuangan tersebut (Naula Oktaviani et al., 2015). Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan kualitas laporan keuangan akan dinilai baik oleh investor. Yenti dan Syofyan (2013), menyatakan bahwa hadirnya corporate governace dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat corporate governance mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. Untuk mewujudkan good corporate governance secara konsisten, diperlukan sikap Integritas dari seluruh karyawan dan Perusahaan.

Integritas terwujud bila adanya pedoman perilaku dan komitmen terhadap etika usaha yang disusun berlandaskan nilai-nilai perusahaan dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Perusahaan (Mas Daniri, 2005).

(Suharto et al., 2019), mendefinisikan komitmen sebagai kesediaan para pelaku sosial untuk memberikan energi dan kesetiiaannya pada sistem sosial, keterikatan sistem kepribadian pada hubungan sosial, yang dipandang sebagai ekspresi diri. Salancik (1977) dalam (Prastiti, 2021) menyatakan bahwa komitmen dapat diartikan sebagai ikatan antara individu dan tindakan. Komitmen juga dapat didefinisikan sebagai rasa loyalitas terhadap suatu sistem sosial. Sedangkan etika dapat diartikan sebagai penilaian dan aturan yang dilandasi moralitas, yang dapat dibedakan antara benar atau salah (Shah moshadi dkk, 2016). Etika juga merupakan nilai dan keyakinan yang menjadi dasar kekuatan perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Firdhauz Zainul Abidin et al., 2019). Dengan penggabungan dua kata tersebut membentuk suatu konsep dari komitmen etika sebagai kesediaan untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai moral dan tindakan yang mengarah pada kebaikan dalam menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder). Menurut (Verschoor, 1998) dalam (Zainul Abidin et al., 2017), komitmen terhadap etika adalah kesediaan organisasi untuk menjalankan operasi sebagaimana yang telah tertulis dalam kode etik. Komitmen terhadap etika melibatkan tanggung jawab perusahaan terhadap perilaku bisnis yang etis (Zainul Abidin et al., 2017). Manajemen bisnis yang beretika dapat menjadi suatu keunggulan atau senjata untuk bersaing dengan perusahaan lain di pasar global saat ini (Kwakye et al., 2018). Etika perusahaan menciptakan reaksi pasar yang positif (Karim et al., 2019). Perusahaan dengan tingkat etika yang tinggi mampu menarik stakeholder maupun pemegang saham.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Komitmen Etika Berpengaruh Terhadap Kualitas Laba Perusahaan Yang Terdaftar Dalam JII 70 ? “

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen etika terhadap kualitas laba diperusahaan yang terdaftar dalam JII 70.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Pengaruh komitmen etika terhadap kualitas laba pada perusahaan yang terdaftar dalam JII 70“. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Variabel Eksogen

a. Komitmen Etika (X)

Menurut Verschoor (1998) dalam Zainul Abidin (2017), komitmen terhadap etika adalah kesediaan organisasi untuk menjalankan operasi sebagaimana yang telah tertulis dalam kode etik. Komitmen etika merupakan variabel eksogen yang diukur dengan menggunakan Ethical Commitment Item (ECI). Item komitmen etika dihitung dengan menggunakan sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sistem perhitungan dengan menggunakan 2 simbol, 0 dan 1.

0 : jika item tersebut tidak diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

1 : jika item tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Menurut Firdhauz Zainul Abidin dkk., 2019, indikator komitmen etika (ECI) sebagai berikut :

1. Nilai-nilai etika

Nilai-nilai etika perusahaan atau *core value* merupakan landasan budaya etika dalam perusahaan. Nilai-nilai etika dapat disalurkan melalui visi dan misi perusahaan,

2. Kode Etik

Kode etik terdiri dari pernyataan umum serta berfungsi sebagai prinsip dan sebagai dasar aturan perilaku. Kode etik adalah suatu panduan mengenai etika.

3. Promosi Etika

Budaya etis dapat diterapkan dengan efektif apabila perusahaan dapat menerapkan nilai-nilai etika melalui program dan membuat kebijakan terhadap etika. Misalnya, Ketika perusahaan memberikan pelatihan etika kepada seluruh SDM perusahaan atau pemberian peringatan terhadap pelanggaran etika.

4. Kebijakan Whistleblowing (Pedoman dalam melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran)

Whistleblower adalah pelaporan pekerja akan perlakuan amoral, ilegal, dan melanggar hukum. Pelaporan whistleblowing ini bertujuan agar kegiatan berupa penyelewengan etika dapat terungkap oleh publik.

5. Praktik Keberlanjutan (*Sustainability practices*)

Praktik keberlanjutan didefinisikan sebagai memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Praktik keberlanjutan berkaitan dengan dampak tindakan saat ini terhadap ekosistem, masyarakat, dan lingkungan di masa depan. Kekhawatiran tersebut harus tercermin dalam perencanaan strategis korporasi yang berkelanjutan.

6. Komite Etik

Komite etik adalah wadah bagi karyawan atau pemangku kepentingan untuk menyampaikan keprihatinan terkait etika mengembangkan kebijakan terkait etika, serta mendukung, memantau, dan mengevaluasi program etika.

2. Variabel Endogen

a. Kualitas Laba (Y)

Menurut Budiono (2005) dalam (Sukmawati & Agustina, 2014). Laba yang berkualitas adalah laba yang mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Stubben (2010) berargumentasi akan perlunya

mengatasi bias tersebut dengan cara memusatkan perhatian pengukuran manajemen laba pada salah satu faktor pembentuk laba. Stubben berargumen bahwa pendapatan merupakan komponen terbesar yang menyumbangkan laba perusahaan dan juga sebagai subjek utama diskresi manajer, sehingga dengan memfokuskan pada pendapatan akan diperoleh estimasi diskresi yang lebih akurat untuk mengukur praktik manajemen laba. Stubben (2010) dalam (Suyono, 2017) berpendapat bahwa dalam mengukur manipulasi laba secara umum menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\Delta AR_{it} = \alpha + \beta \Delta \delta_{it} + \epsilon_{it}$$

ΔAR = Perubahan piutang tahun ket-1 dengan tahun ket,

δ = pendapatan penjualan tahunan,

Δ = perubahan tahunan.

Model Stubben (2010) menjelaskan bahwa model *discretionary revenue* (pendapatan diskresioner) lebih mampu mengatasi bias dalam pengukuran manajemen laba jika dibandingkan dengan akrual diskresioner. Pengukuran kualitas laba pada penelitian ini menggunakan nilai residual (ϵ_{it}) pada persamaan diatas. Nilai yang mendekati nol maka menunjukkan kualitas labanya semakin baik (tidak ada manipulasi). Sebaliknya jika semakin besar nilai absolut residualnya, maka kualitas labanya akan semakin buruk.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Obyek yang diteliti :

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan yang masuk dalam Indeks Saham JII70 terkait pentingnya komitmen etika dalam perusahaan.

b. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian berikutnya mampu memperbaiki kekurangan pada penelitian ini.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pentingnya etika dalam berbisnis.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada perusahaan yang terdaftar dalam JII 70. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan Komitmen Etika (X) dan Kualitas Laba (Y).

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Penelitian

Subjek	Objek	Metode
Perusahaan yang terdaftar dalam JII70	1. Komitmen Etika (X1) 2. Kualitas Laba (Y) Variabel Kontrol : 1. Ukuran Perusahaan (X2) 2. Leverage (X3) 3. Profitabilitas (X4)	Kuantitatif, PLS-SEM